

OPINI MASYARAKAT TERHADAP DEMOKRASI DI JAWA TENGAH

PUBLIC OPINION ON DEMOCRACY IN CENTRAL JAVA

Arif Sofianto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

email: areef_sofiant@yahoo.com

ABSTRACT

Political reform affects a lot of changes in the socio-political life of society, both in the political understanding and implementation. This study aims to understand how the understanding and implementation of democracy in Central Java at this time. The study used a descriptive approach to the analysis, and involves about 500 informants in Central Java. The conclusion of this study is that the substance of democracy and its implementation in the community is experiencing a change for a new form, where there is a clash of democratic values which sided constructive and destructive. Democracy constructively interpreted by structuring the system of government, social and political systems, the creation of an atmosphere of equality, freedom of togetherness and involvement of people in decision-making, the use of political procedures that allow broad participation. Democracy forms of destructive behavior such intervention against state institutions, violate the rights of others, and are not tolerant of differences

Keywords: *democracy, reform, politics*

PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi isu sentral dalam satu dekade terakhir ini terkait dengan dinamika perubahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia. Masyarakat menaruh harapan besar adanya perbaikan sebagai hasil dari perkembangan demokrasi diIndonesia. Di sisi lain masih terdapat beberapa perdebatan mengenai substansi dan implementasi demokrasi itu sendiri.

Hasil survei yang dilakukan oleh Sharma, et.al. (2010) menemukan pemahaman demokrasi masyarakat Indonesia sebesar 38% orang mengasosiasikan dengan kebebasan, 41% mengatakan mereka tidak tahu dan 4% menyebut harmoni, 2% tentang kesempatan individu, dan kekuasaan di tangan rakyat sebanyak 2%. Mereka yang mengatakan tidak tahu mengenai demokrasi kebanyakan berasal dari tingkat

pendidikan menengah pertama ke bawah. Ada beberapa pendapat mengenai demokrasi di Indonesia. 74% percaya bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, 15% mengatakan Indonesia ada sisi demokratis dan tidak demokratisnya, 6% mengatakan tidak demokratis dan 5% mengatakan tidak tahu. Sebanyak 72% masyarakat Indonesia mengatakan lebih suka demokrasi, 20% mengatakan bahwa jenis pemerintahan tidak bermasalah bagi mereka, dan 4% mengatakan pemerintahan non-demokratis kadang-kadang lebih baik, dan 4% mengatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki harapan besar terhadap demokrasi.

Akan tetapi menurut beberapa pihak nilai-nilai demokrasi yang dipahami kebanyakan orang justru sering menunjukkan demokrasi semu atau bahkan berbeda sama sekali dengan demokrasi

yang diharapkan. Haynes (2000) menggambarkan bahwa di kebanyakan negara dunia ketiga, demokrasi lebih memperlihatkan sisi formalitas, yang terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan, dan lebih khusus lagi terfokus pada pemilihan umum.

Di Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai macam hambatan yang kadang berkebalikan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Marcus Mietzner (2009) mencatat bahwa demokratisasi di Indonesia lebih menampilkan wajah popularitas figur di hadapan rakyat. Pemaknaan demokrasi jauh dari persoalan kinerja politik, namun mengarah pada performa individu. Masyarakat telah berharap banyak pada figur pemimpin untuk menegakkan demokrasi ketimbang sistem politik maupun kinerja partai politik.

Untuk memahami demokrasi lebih mendalam telaah beberapa ahli dapat menjadi acuan. Hasil penelitian yang dilakukan UNESCO tahun 1949 (Miriam Budiardjo, 2008) menyatakan bahwa demokrasi dianggap paling baik saat ini. Namun di sisi lain, konsep demokrasi itu sendiri dianggap ambigu atau mempunyai banyak pengertian mengenai ide dan praktiknya. Di sisi lain, Schumpeter (Leo Agustino, 2007) mengemukakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama, sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat

Sedangkan Mayo (Miriam Budiardjo 2008) berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan. Huntington mengidentifikasi demokrasi dengan pemilu, secara minimalis demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan umum terbuka, bebas

dan adil, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, terjaganya stabilitas serta adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom. (Leo Agustino, 2007). Sejalan dengan itu, Dahl (Sahid Gatara, 2009) menyatakan bahwa untuk menegakkan demokrasi dibutuhkan 6 lembaga. *Pertama*, pemimpin yang dipilih melalui pemilu. *Kedua*, pemilu yang jujur, adil, bebas dan periodik. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. *Keempat*, terbukanya akses informasi. *Kelima* otonomi asosiasi bagi warga. *Keenam* hak kewarganegaraan yang inklusif.

Beberapa ahli mengelompokkan demokrasi menjadi demokrasi formal/prosedural dan substansial. Demokrasi formal berorientasi pada pelembagaan, proses terutama pemilihan umum dan partisipasi dalam pemilu. Demokrasi substansial lebih fokus pada hakikat demokrasi itu sendiri, mengutamakan nilai. Menurut Haynes (2007) demokrasi di kebanyakan negara dunia ketiga adalah demokrasi formal.

Demokratisasi di Indonesia telah dilaksanakan secara prosedural yang salah satunya diwarnai dengan semakin intensifnya pemilihan umum langsung atau sering disebut pemilu. Masyarakat semakin sering dihadapkan pada proses pemilihan umum secara langsung dalam memilih para pemimpin mereka, mulai dari presiden, DPR dan DPD serta DPRD, dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum oleh banyak pihak diyakini sebagai salah satu indikator demokrasi, terutama di tingkat daerah (Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepada Daerah). Sebagian Pemilu menghasilkan pemimpin yang memang didukung sebagian besar masyarakat, sementara sebagian lagi menghasilkan konflik horizontal maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain Masyarakat berharap bahwa demokrasi sanggup membawa perbaikan terhadap kehidupan mereka.

Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana substansi demokrasi serta implementasinya yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Memahami masyarakat dalam mengartikan demokrasi menjadi sangat penting sebagai landasan model demokrasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengungkap pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, khususnya di Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian melibatkan informan dari berbagai kalangan, baik masyarakat umum, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh partai maupun anggota ormas di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan isian kuesioner dari para informan. Data sekunder berasal dari dokumen terkait objek penelitian. Instrumen yang digunakan dalam ini ialah panduan wawancara mendalam serta daftar pertanyaan untuk informan dari berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana yang bertujuan mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan teknik deskriptif analitis. Penelitian dilakukan pada tahun 2012 di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Penelitian ini melibatkan berbagai pihak sebagai informan, baik informan kunci yang diwawancara secara mendalam maupun informan yang diminta menjawab daftar pertanyaan tertulis. Penelitian ini melibatkan sebesar 500 orang informan yang berasal dari aparatur pemerintah dan

lembaga penyelenggara pemilu (60 orang) tokoh masyarakat (40 orang) dan masyarakat umum (400 orang).

Informan penelitian dipilih dengan cara acak dan memperhatikan komposisi penduduk Jawa Tengah secara umum. Informan diklasifikasikan berdasarkan karakter demografis tertentu, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan aktifitas dalam organisasi. Berdasarkan usia, informan diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kematangan dalam berpolitik, yaitu mulai usia 16 – 25 tahun sampai pada usia 56 tahun atau lebih. Sesuai dengan kondisi umum yang ada di Jawa Tengah, maka informan terdiri dari kelompok usia 16-25 sebesar 11.8%, usia 26 – 35 sebesar 18%, usia 36 – 45 sebesar 31%, usia 46 – 55 sebesar 27.2% dan 56 ke atas sebesar 12%. Informan berdasarkan jenis kelamin komposisinya sedikit berbeda dengan komposisi secara umum penduduk di Jawa Tengah, yaitu 66.5% laki-laki dan 33.5% perempuan. Namun hal tersebut tidak mengurangi akurasi hasil penelitian. Jenis pekerjaan informan sesuai dengan komposisi secara umum penduduk Jawa Tengah, yaitu bekerja di sektor swasta (sebagai karyawan/buruh) dan sektor lainnya yaitu sektor ekonomi informal lainnya. Tingkat pendidikan informan juga menggambarkan kondisi secara umum, yaitu terbanyak tingkat SLTA, SLTP dan SD.

Informan sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal tersebut terlihat dari komposisi informan terbesar berpendapatan 1 juta rupiah ke bawah, dan secara umum tingkat pendapatan sebagian besar berada di bawah Rp. 3 juta. Komposisi tersebut merupakan cerminan dari penduduk di Jawa Tengah saat ini.

Informan dalam penelitian ini berasal dari berbagai kalangan yang berbeda latar belakang organisasi mereka.

Sebagian besar informan terlibat, baik menjadi pengurus maupun sekedar anggota biasa dalam berbagai organisasi kemasyarakatan (16%), keagamaan (12,5%), organisasi profesi (10,2%), organisasi sosial budaya (5%), organisasi hobi (4,8%), partai politik (4,5%), LSM (0,8%) serta ada beberapa yang terlibat berbagai organisasi (0,8%) dan organisasi lainnya (26%) dan sisanya (19,5%) tidak terlibat dalam organisasi.

B. Pemahaman Mengenai Demokrasi

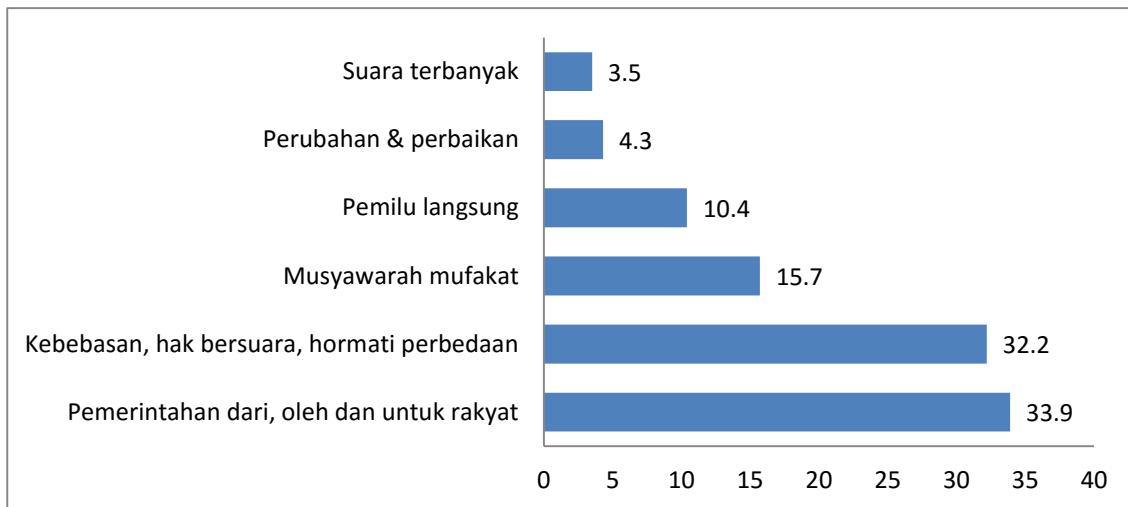
Reformasi memberikan berbagai pengaruh penting terkait perubahan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat berupa menyebarluasnya ide tentang kesetaraan, kebebasan dalam berpendapat atau aspirasi menjadi ide utama dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya perubahan politik di tingkat nasional terutama dalam tatanan kelembagaan politik, prosedur, sistem nilai, serta perubahan kebijakan pemerintah memunculkan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Ide mengenai kebebasan berpendapat, keleluasaan beraktifitas politik yang menunjukkan kesamaan dan adanya transparansi dan kebebasan informasi memberikan harapan perbaikan ke depan.

Ketika informan diminta untuk memberikan pandangan mengenai apakah demokrasi merupakan sistem politik terbaik untuk Indonesia, pendapat hampir seimbang antara yang menyatakan kurang dan tidak yakin dengan yang menyatakan yakin bahwa demokrasi adalah sistem terbaik untuk Indonesia. Mereka yang tidak yakin bahwa demokrasi bukan merupakan sistem politik terbaik untuk Indonesia sebagian besar karena melihat kenyataan bahwa kondisi Indonesia masih morat-marit, dimana elit politik masih

mementingkan diri sendiri, belum ada keterbukaan, transparansi, serta SDM yang masih belum siap. Mereka yang masih belum yakin karena kenyataan bahwa kebebasan yang ada tidak terkontrol, tidak menuju perbaikan, kondisi ekonomi masih belum membaik, serta manusia yang belum siap menerima perubahan, pelaku kurang memahami demokrasi, tidak ada kesatuan sikap dan banyaknya penyalahgunaan wewenang.

Mereka yang menyatakan yakin dan sangat yakin berpegang pada kenyataan bahwa demokrasi sejalan dengan karakter dan kondisi bangsa Indonesia. Demokrasi menghargai perbedaan sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Kegotongroyongan, saling menghargai, menerima perbedaan, keterbukaan, kebersamaan, dan saling kerjasama merupakan ciri bangsa Indonesia yang sejalan dengan demokrasi.

Pemahaman terhadap demokrasi di masyarakat sangat beragam, yang bisa disarikan menjadi 6 kelompok utama. Kelompok pertama ialah mereka yang menyatakan demokrasi identik dengan proses politik berdasarkan suara terbanyak. *Kedua* adalah mereka menyamakan demokrasi dengan perubahan ke arah perbaikan, *Ketiga*, mengidentifikasi demokrasi sebagai proses pemilihan pemimpin secara langsung. *Keempat*, mengidentifikasi demokrasi sebagai proses penentuan keputusan dengan musyawarah mufakat. *Kelima*, demokrasi sebagai nilai-nilai kebebasan, hak bersuara dan menghormati kebebasan. *Keenam*, adalah mereka yang memahami demokrasi sebagai tata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan ide ini mendapat dukungan terbesar seperti gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Pemahaman mengenai demokrasi

Berdasarkan gambar 1 di atas, sebagian besar orang memahami bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan atau kekuasaan yang dimaksud adalah adanya pemisahan kekuasaan beserta lembaga-lembaganya, sehingga tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Keterlibatan masyarakat lebih nyata melalui wakil-wakil mereka yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan.

Sebagian besar lainnya memahami demokrasi sebagai kebebasan, hak bersuara dan saling menghormati perbedaan. Pemahaman lainnya adalah musyawarah mufakat, pemilu langsung dan keputusan suara terbanyak. Berdasarkan data di atas, lebih banyak masyarakat yang memahami demokrasi sebagai nilai-nilai, terutama nilai tentang kebebasan, hak bersuara dan menghormati perbedaan. Kesamaan posisi dalam hukum dan pemerintahan menjadikan masyarakat saat ini lebih berani bertindak. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan mengeluarkan pendapat atau aspirasi dalam berbagai situasi. Kebebasan dan kesamaan juga dipahami sebagai kesetaraan peran, baik antara laki-laki dan

perempuan maupun antara yang tua dan muda. Di level masyarakat lokal adalah kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Sebagian besar orang menggasosiasi implementasi demokrasi di lingkungan melalui proses musyawarah dalam membahas berbagai hal. Demokrasi sebagai nilai kebebasan menempati posisi utama dalam wacana politik masyarakat sebagai satu-satunya standar yang paling baik. Sebagian besar warga meyakini bahwa reformasi telah memberikan pengaruh yang baik terhadap demokrasi dan pelaksanaannya di tingkat nasional maupun local dengan adanya kebebasan

Musyawarah dianggap nilai utama berdemokrasi bagi sebagian besar masyarakat lainnya. Demokrasi dimaknai ada ketika segala persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau hajat hidup orang banyak dibahas bersama dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya.

Demokrasi juga dimaknai dalam hal memilih pemimpin yaitu dengan melibatkan banyak orang melalui pemilu. Seiring perubahan sistem politik di Indonesia, pemilihan pemimpin sesuai dengan nilai demokrasi dipahami lebih pada prosesnya yang berupa pemilu.

Demokrasi sebagai tindakan merupakan sikap mengutamakan keterlibatan banyak orang. Reformasi telah memberikan inspirasi yang penting kepada masyarakat mengenai bagaimana cara-cara memilih pemimpin.

Jika dikaitkan dengan pemahaman demokrasi sebagai musyawarah mufakat terdapat kecenderungan pemilihan, dimana dalam memilih pemimpin, pemilu adalah yang demokratis, sementara ketika menyelesaikan masalah lainnya, musyawarah adalah langkah yang demokratis. Perubahan yang cukup penting adalah adanya sebuah pemahaman mengenai cara dan tujuan dalam mekanisme politik. Pemahaman mengenai cara dan tujuan ialah mengenai cara seperti apa yang cocok digunakan untuk apa. Untuk menyelesaikan segala persoalan musyawarah adalah tindakan utama yang demokratis, namun dalam memilih pemimpin, pemilu adalah yang paling demokratis.

Ketika diminta memberikan pendapat apakah demokrasi harus selalu menjadi pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, sebagian besar informan menyatakan setuju (69,50%) dan sangat setuju (10,75%), namun sebagian kecil lainnya menyatakan kurang setuju (14,50%) dan tidak setuju (1,75%). Mereka yang kurang setuju atau tidak setuju dengan prinsip demokrasi dalam segala tindakan memutuskan sesuatu beralasan karena tidak semua harus berasaskan demokrasi. Ada kalanya suatu keputusan ditentukan dengan prinsip lain yang sesuai, tidak selamanya harus melibatkan banyak orang. Setiap keputusan memiliki jalan penyelesaian sendiri, yang lebih diperhatikan adalah norma atau dasar pengambilan dan tujuan keputusan itu sendiri, sehingga caranya tentu berbeda setiap keputusan. Mereka yang sejalan dengan cara demokrasi, memandang bahwa demokrasi sejalan dengan

musyawarah mufakat, adanya keterlibatan orang banyak. Setiap keputusan dapat diambil dengan lebih baik. Demokrasi juga dapat menuju kehidupan yang lebih baik.

Di sisi lain, sebanyak 3,5% informan mengidentifikasi demokrasi sebagai penentuan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi memungkinkan transformasi dari "kuantitas menjadi kualitas", dimana pendapat yang disetujui oleh lebih banyak orang merupakan pendapat terbaik. Tentu hal ini akan menjadi berkebalikan dengan musyawarah mufakat. Namun pada beberapa kondisi keduanya dapat saling melengkapi, dimana ketika musyawarah mufakat gagal mencapai hasil, maka suara terbanyak adalah pilihan terbaik.

Sementara sebagian kecil orang memandang seharusnya demokrasi adalah sistem yang membawa perubahan dan perbaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya proses reformasi yang diharapkan membawa perbaikan. Reformasi sebagai proses demokratisasi tentu beriringan dengan semangat perubahan dan perbaikan itu sendiri.

C. Implementasi Demokrasi di Masyarakat

Sebuah ide dan konsep akan menjadi utuh ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik demokrasi di masyarakat sangat beragam dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Sebagaimana pemahaman demokrasi yang sangat beragam, dalam masyarakat, bagaimana demokrasi diwujudkan juga memiliki keragaman yang banyak. Pemahaman warga mengenai bagaimana demokrasi dijalankan dalam kehidupan, diklasifikasikan kedalam beberapa konsep utama.

Pertama adalah mereka yang memahami praktik demokrasi sebagai sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial dan politik. *Kedua* adalah mereka yang

memahami penerapan demokrasi sebagai kegiatan partisipasi dalam kegiatan sosial politik. *Ketiga* adalah mereka yang memahami pelaksanaan demokrasi sebagai mematuhi aturan atau mendukung kebijakan pemerintah. Ada juga berbagai pemahaman lain yang cukup beragam, yang intinya adalah berujung pada sebuah kondisi yang diharapkan atau penilaian terhadap kondisi saat ini.

Demokrasi lokal bersandar pada bagaimana sikap dan perilaku menghargai perbedaan dan keberadaan pihak lain dijunjung, partisipasi yang tinggi dalam lingkungan serta mematuhi aturan main yang telah disepakati. Kenyataannya konsep nilai dan perilaku demokrasi selalu berbenturan dengan nilai dan perilaku nondemokrasi. Hadirnya nilai baru yang mendukung maupun menghambat demokrasi juga berinteraksi dengan nilai lama yang mendukung atau menghambatnya. Demokrasi juga dimaknai sebagai proses transaksi politik. Wujud nyata demokrasi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam relasi sosial.

Melalui berbagai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, warga memiliki penilaian terhadap proses demokrasi yang berjalan di lingkungan mereka. Berdasarkan tanggapan warga, 92,11% percaya bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan ciri-ciri demokrasi dalam berbagai ranah kehidupan. Demokrasi yang dimaksud masyarakat adalah segala sesuatu, persoalan yang menyangkut kepentingan bersama dibahas bersama atau dimusyawarahkan dengan melibatkan segenap warga.

Di sisi lain demokrasi yang dimaknai sebagai kebebasan juga memberikan dampak perubahan yang cukup berarti. Saat ini penyerobotan terhadap hak public, pengabaian keberadaan negara, intoleransi terhadap perbedaan dan hak orang lain kerap terjadi.

Masyarakat bebas melakukan apapun yang diinginkan dengan dalih kebebasan di era demokrasi. Kondisi ini berlangsung di berbagai tempat sehingga menghasilkan perubahan tatanan yang tidak lagi terarah.

Penjelasan di atas membawa pada suatu pemahaman bahwa karakteristik demokrasi masyarakat sedang dalam tahap mencari bentuk, ada sisi konstruktif dan ada sisi destruktif. Demokrasi dalam masyarakat dipahami dalam berbagai pengertian. *Pertama* ialah pemahaman demokrasi sebagai konsep kekuasaan atau tata pemerintahan. Bentuk kekuasaan yang terpisah dengan kelembagaan yang tertata sedemikian rupa menjamin hak-hak warga negara.

Kedua, demokrasi sebagai nilai-nilai, berorientasi pada kebebasan, kebersamaan dan kesetaraan. Nilai-nilai tersebut diyakini oleh sebagian besar masyarakat sebagai substansi demokrasi. Demokrasi ialah ketika semua orang bebas memiliki pandangan atau aspirasi, diperhatikan haknya sama dengan lainnya dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya.

Ketiga, demokrasi secara praktik dipahami dalam 2 kategori utama berdasarkan tujuan, yaitu suara terbanyak dan musyawarah mufakat. Dalam berhubungan dengan memilih pemimpin, suara terbanyak (pemilu) merupakan nilai demokrasi yang utama. Sedangkan dalam persoalan sehari-hari, cara demokrasi dilakukan dengan musyawarah. Keduanya memberikan kemungkinan semua orang untuk berpartisipasi.

Selain pemaknaan demokrasi yang konstruktif di atas, juga terdapat pemaknaan demokrasi yang destruktif. Pemahaman serta perilaku bahwa pada masa reformasi ini apapun boleh dilakukan dan siapapun bisa terjadi secara meluas. Saat ini telah terjadi benturan antara nilai-nilai individual dan nilai-nilai komunalisme dalam masyarakat.

Meluntunya nilai-nilai demokrasi tradisional yang dianggap kurang sesuai zaman diganti dengan nilai modern sebagai akibat perubahan yang menghasilkan perilaku nondemokrasi banyak terjadi.

Bentuk perilaku destruktif bagi demokrasi yang berhubungan dengan sistem politik nasional misalnya intervensi masyarakat terhadap tugas lembaga negara, kerusuhan dalam pemilu, kerusuhan terhadap proses hukum dan sebagainya lahir dari kekecewaan terhadap kinerja aparat pemerintah namun dilakukan dengan cara yang kurang konstruktif. Perilaku destruktif dalam lingkungan misalnya menolak hadir dalam pertemuan, tidak mengikuti kegiatan atau tidak melaksanakan kesepakatan bersama karena perasaan tidak peduli dan sebagian karena ketidakpuasan dengan sesama warga atau pengurus RT, tanpa niat untuk berdialog.

PENUTUP

A. Simpulan

Substansi demokrasi serta implementasinya dalam masyarakat kini sedang mengalami perubahan mencari bentuk baru yang diwarnai dengan benturan nilai-nilai demokrasi yang bersisi konstruktif dan destruktif. Demokrasi secara konstruktif dimaknai dengan penataan system pemerintahan, system social dan politik, penciptaan suasana

kesetaraan, kebebasan kebersamaan serta keterlibatan banyak orang dalam penentuan keputusan, penggunaan prosedur-prosedur yang memungkinkan partisipasi secara luas.

Selain itu juga telah terjadi benturan antara nilai-nilai individual dan nilai-nilai komunalisme dalam masyarakat sehingga sangat rentan menghasilkan konflik horisontal. Perkembangan demokrasi juga diwarnai dengan melemahnya posisi Negara dan aparaturnya di hadapan publik. Meluntunya nilai-nilai demokrasi tradisional seperti musyawarah, pengakuan terhadap perbedaan, institusionalisasi kehidupan masyarakat dan kebersamaan yang dianggap kurang sesuai zaman diganti dengan nilai modern sebagai akibat perubahan yang menghasilkan perilaku nondemokrasi banyak terjadi.

B. Saran

Pemerintah dan pihak terkait memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa demokrasi di tingkat nasional disokong oleh demokrasi di tingkat lokal oleh masyarakat sendiri. Perlunya penegakkan peran institusi demokrasi, baik pemerintah maupun nonpemerintah sebagai langkah menangkal pemahaman dan perilaku yang destruktif terhadap demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo, 2007, *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gatara, AA, Sahid, 2009, *Ilmu Politik; Memahami dan Menerapkan*, Pustaka Setia, Bandung

- Haynes, Jeff, 2000, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, diterjemahkan dari judul asli "Democracy and Civil Society in the Third World Politics and New Political Movement" oleh P, Soemitro, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Jurnal Ilmiah dan rilis hasil penelitian

Mietzner, Marcus (2009), *Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia Catalyst or obstacle to democratic consolidation?*, Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, Vol. 165, no. 1 (2009), pp. 95–126, <http://www.kitlv-Journals.nl/index.php/btlv>

Sharma, Rakesh Lauren Serpe, and Astri Suryandari (2010), *Indonesia Electoral Survey 2010* November 2010, IFES (International Foundation for Electoral Systems) for the Australian Agency for International Development.